



UPDATE KEADILAN

Periode: Oktober 2006

Terbitan: 14/2006

JAWABAN JSMP TERHADAP LAPORAN KOMISI KHUSUS PENYELIDIK INDEPENDEN PBB UNTUK TIMOR LESTE

1. Latar Belakang

Pada akhir Juni 2006 Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atas permohonan dari Sekretaris-Jenderal PBB membentuk Komisi Khusus Penyelidik Independen untuk Timor-Leste. Tugas pokok Komisi adalah:

"(a) Untuk menentukan fakta-fakta dan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 28 dan 29 April, 23, 24 dan 25 Mei dan kejadian-kejadian terkait yang memperbesar krisis, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak berfungsinya sektor keamanan;

(b) Untuk menjelaskan tanggungjawab atas kejadian-kejadian tersebut;

(c) Untuk merekomendasikan tindakan-tindakan yang akan menjamin pertanggungjawaban utama untuk kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan dilakukan selama periode tersebut ...;

(d) Untuk melaporkan temuan-temuannya dalam waktu tiga bulan dari waktu pembentukannya melalui Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Parlemen Nasional Timor Leste."¹

Menurut mandatnya, Komisi harus menyampaikan hasil investigasinya kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Parlemen Timor Leste pada tanggal 7 Oktober 2006. Namun laporan itu akhirnya diserahkan kepada Parlemen Nasional Timor Leste di gedung parlemen Dili pada Hari Selasa, 17 Oktober 2006.

Sebagai NGO nasional yang melakukan pemantauan atas sistem yudisial di Timor Leste, JSMP menyambut baik laporan Komisi Khusus Penyelidik Independen untuk Timor-Leste. JSMP mengamati bahwa dari saat kegiatannya dimulai pada tanggal 7 Juli, 2006, Komisi menaati mandatnya secara teliti. JSMP percaya bahwa Komisi benar-benar independen dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan bertindak tanpa pengaruh dari pihak ketiga.

¹ Laporan Komisi Khusus Penyelidik Independen PBB untuk Timor-Leste, Geneva, 2 Oktober 2006, pasal.4.

2. Temuan-Temuan Komisi

Dalam laporannya, Komisi menyampaikan temuan-temuannya tentang apa yang terjadi selama krisis pada April dan Mei 2006. Selain itu, Komisi melakukan hal-hal yang berikut:

- Menyampaikan temuan-temuannya tentang tanggungjawab lembaga tertentu di Timor Leste berhubungan dengan krisis, khususnya F-FDTL, PNTL, Pemerintah (termasuk Perdana Menteri), Presiden, dan UNOTIL;
- Menyebutkan orang-orang tertentu yang layak diduga ikut serta dalam kegiatan kriminal yang berhubungan dengan krisis yang terjadi pada bulan April dan bulan Mei dan merekomendasikan agar mereka dituntut (diproses secara hukum); dan
- Menyebutkan orang-orang tertentu yang oleh karena keterlibatannya dalam kejadian-kejadian bulan April dan bulan Mei berarti mereka pantas diselidiki secara lebih lanjut walaupun belum ada bukti yang memadai untuk merekomendasi agar mereka dituntut pada saat ini.

Komisi menyimpulkan bahwa “kegagalan supremasi hukum dan pertanggungjawaban mendasari kejadian-kejadian April dan Mei.”² Komisi merekomendasikan agar tindakan tertentu diambil untuk memperkuat sistem peradilan domestik supaya sistem tersebut dapat digunakan secara lebih efektif untuk membuktikan pertanggungjawaban orang-orang yang terlibat dalam krisis tersebut. Rekomendasi tersebut termasuk perekrutan staf internasional untuk memimpin proses peradilan; peningkatan sumber daya untuk pengadilan, kantor Kejaksaan dan kantor pembela umum serta penyediaan pelayanan keamanan yang memadai; juga pembentukan program perlindungan saksi.

3. Praduga Tak Bersalah

JSMP menegaskan bahwa laporan Komisi adalah hasil dari penyelidikan dan investigasi. Komisi mencantumkan rekomendasi tentang penuntutan untuk orang-orang tertentu, tetapi tidak merupakan putusan tentang bersalah atau tidaknya orang-orang tertentu. Putusan semacam ini hanya dapat diambil oleh pengadilan. Penting agar masyarakat mengerti hal ini dan menghormati prinsip praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*). Pengadilan adalah satu-satunya pihak yang dapat menjatuhkan putusan tentang apakah seorang telah melakukan suatu kejahatan atau tidak, dan kemudian menjatuhkan hukuman. Komisi secara spesifik menegaskan bahwa tingkat pembuktian yang diterapkan adalah standar kecurigaan yang layak, dan bukan standar pembuktian yang tidak dapat diragukan kembali.³ Oleh karena itu, orang-orang yang disebutkan dalam laporan Komisi sebagai orang yang pantas dituntut hanya dapat dianggap sebagai tersangka sampai saat mereka diadili oleh pengadilan.

² Laporan Komisi Khusus Penyelidik Independen PBB untuk Timor-Leste, Geneva, 2 Oktober 2006, pasal.136.

³ Laporan Komisi Khusus Penyelidik Independen PBB untuk Timor-Leste, Geneva, 2 Oktober 2006, pasal.110.

Berdasarkan alasan tersebut, JSMP menegaskan bahwa rekomendasi Komisi itu harus disusul oleh pelaksanaan persidangan pidana yang akan memungkinkan pengadilan untuk memutuskan apakah orang-orang yang terdaftar dalam laporan Komisi sebenarnya bersalah atau tidak.

4. Pelaksanaan rekomendasi Komisi

JSMP percaya bahwa penting agar Timor-Leste menindaklanjuti rekomendasi Komisi.

JSMP mencatat bahwa dalam kasus-kasus sebelumnya dimana komisi-komisi internasional telah bertindak di Timor Leste, namun Presiden, Pemerintah dan Parlemen tidak mengikuti (tidak menaati) rekomendasinya. Dalam banyak kasus dimana penuntutan direkomendasikan, orang-orang tersebut tidak diproses secara hukum di hadapan pengadilan. Sebaliknya, putusan politik seringkali digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana, ini merupakan sebuah praktek yang menimbulkan dampak negatif pada demokrasi dan supremasi hukum.

- Pada bulan Mei 2005 Komisi Ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB menyelesaikan laporannya yang termasuk, antara lain, rekomendasi agar dilanjutkan penuntutan atas kejahatan berat yang dilakukan pada 1999 dan sebelumnya, atau sebagai alternatif, pembentukan mekanisme internasional oleh PBB untuk menuntut kejahatan tersebut.⁴ Rekomendasi tersebut tidak diterapkan (tidak pernah diimplementasikan) oleh Pemerintah Timor Leste.
- Pada tanggal 31 Oktober 2005 Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (yang biasanya disebut dengan akronim Bahasa Portugis "CAVR") menyerahkan laporannya kepada Presiden Timor Leste. Presiden menyampaikan laporan itu kepada Parlemen pada tanggal 28 November 2005. Laporan tersebut termasuk, antara lain, rekomendasi untuk meningkatkan sistem peradilan⁵ dan untuk menuntut orang-orang yang terlibat dalam kejahatan berat yang dilakukan antara 1975 sampai 1999.⁶ CAVR juga mencantumkan daftar tersangka yang direkomendasikan untuk diserahkan kepada Kantor Jaksa Agung agar bisa diinvestigasi dan dituntut.⁷ Namun, mayoritas rekomendasi yang diuraikan dalam laporan CAVR itu tidak ditindaklanjuti. Sebaliknya, walaupun CAVR memberi rekomendasi untuk melakukan penuntutan, Pemerintah mencari metode alternatif untuk penyelesaiannya kemudian mengesampingkan pengadilan melalui kompromi-kompromi politik yang dibuat dengan pihak-pihak lain. Tindakan-tindakan tersebut meningkatkan

⁴ Laporan kepada Sekretaris Jenderal dari Komisi Ahli untuk Meninjau Penuntutan atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor-Leste pada 1999, 26 Mei 2005, Lampiran II pada UN Doc S/2005/458, pasal 503-513.

⁵ *Chega!*, Laporan Akhir dari Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, Bagian 11, halaman 16-17.

⁶ *Chega!*, Laporan Akhir dari Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, Bagian 11, halaman 24-26.

⁷ *Chega!*, Laporan Akhir dari Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, Bagian 11, halaman 25 (rekomendasi 7.1.6)

kekebalan hukum bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di Timor-Leste dan mengurangi komitmen Timor Leste untuk menaati keadilan dan supremasi hukum. Dengan kata lain, kita hanya berpreseden untuk menciptakan dan memperkuat budaya impunitas di Timor Leste.

Dengan memperhatikan preseden-preseden tersebut di atas dengan rasa prihatin, JSMP menghimbau kepada semua lembaga kedaulatan di Timor Leste untuk menjamin pelaksanaan rekomendasi Komisi tersebut. Sangat penting agar Kantor Jaksa Agung mengikuti rekomendasi Komisi ini berhubungan dengan penuntutan dan investigasi atas kegiatan orang-orang tertentu. Agar Kantor Kejaksaan dapat melakukan hal ini secara efektif, juga penting agar Pemerintah, Presiden dan UNMIT mengikuti rekomendasi Komisi yang dimaksudkan untuk memperkuat sektor peradilan di Timor Leste.

Akhirnya, laporan Komisi juga merekomendasi agar Kantor Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, UNMIT dan NGO-NGO tetap memantau kemajuan kasus-kasus yang berhubungan dengan krisis. Sesuai dengan rekomendasi ini, JSMP akan tetap melanjutkan pekerjaannya, yaitu memantau dan melaporkan kemajuan kasus-kasus yang mengakibatkan terjadinya krisis serta jawaban-jawaban terhadap laporan Komisi Penyelidik Independen ini.